

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sejalan dengan era globalisasi dan berkembangnya dunia usaha maka sebagai konsekuensinya makin banyak masalah yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks, sehingga keadaan ini menuntut para pemimpin atau manajemen perusahaan agar dapat mengelola kegiatan perusahaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Usman, 2013).

Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam organisasi dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau sekelompok orang. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Hiro Tugiman (2006:32) yang mendefinisikan *fraud* sebagai “suatu susunan ketidakberesan dari perbuatan ilegal yang merupakan suatu muslihat yang dilakukan untuk keuntungan atau kerugian organisasi, yang dilakukan oleh orang di luar atau orang di dalam organisasi”. Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi, khususnya di Indonesia menunjukkan bahwa kecurangan masih tinggi di pemerintah atau di perusahaan swasta maupun BUMN, padahal BUMN didirikan untuk mengembangkan misi dalam memberikan kontribusi kepada negara, pelayanan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat. Hal ini juga membuat lemahnya kepercayaan publik kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Meski belum ada informasi spesifik di

Indonesia, namun dalam artikel yang dikutip oleh (Novatiani, 2013) dituliskan bahwa pada saat rapat kerja dengan DPR pada tanggal 19 Mei 2005, Menteri BUMN melaporkan adanya dugaan korupsi pada 16 BUMN. Banyaknya korupsi ini merupakan indikasi bahwa tata kelola perusahaan cenderung tidak berjalan optimal, *Standard Operational Procedure (SOP)* sering dilanggar, Satuan Pengawas Intern (SPI) kurang diberdayakan, dan fungsi-fungsi satuan pengawasan internal dikerdilkan oleh dewan direksi.

Salah satu badan usaha milik negara yang diduga terjadi tindakan kecurangan adalah PT. Pos Indonesia. Kejaksaan Agung menerima laporan indikasi kerugian yang menimpa PT. Pos Indonesia dalam proyek pembuatan kalender dan agenda tahun 2012, karena ada indikasi proyek tersebut merugikan perusahaan milik negara itu setelah kalender dan agenda yang diproduksi oleh rekanan pemenang tender tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan oleh PT. Pos Indonesia. Peserta tender lainnya, menduga PT. Pos Indonesia dirugikan, namun Divisi Pengadaan Barang atau pejabat yang terlibat dalam lelang tersebut tidak mempermasalahkannya (Oktaviani, 2015).

Kecurangan terjadi karena ada faktor penyebab yang tidak terlepas dari konsep segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Faktor tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang diakibatkan karena kebutuhan atau masalah finansial. Kedua, faktor kesempatan terjadi karena kurang efektifnya pengendalian internal dan ketiga faktor rasionalisasi dimana sikap

pembenaran yang dilakukan oleh pelaku dengan merasionalkan tindakan kecurangan adalah sesuatu yang wajar (Tuannakotta, 2007:107-111).

Ada tiga bentuk kecurangan, antara lain: Pertama, penyalahgunaan atas aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Kedua, pernyataan palsu atas laporan keuangan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan itu. Ketiga, korupsi penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintah untuk keuntungan pribadi (Tuannakotta, 2007:96). Ketiga bentuk kecurangan tersebut dapat dicegah supaya tidak terjadi atau setidaknya dapat mengurangi adanya tindak kecurangan.

Pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut (Amrizal, 2004:4). Pencegahan *fraud* di sektor publik dilakukan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai sanksi yang diharapkan dapat menangkal atau setidaknya dapat mengurangi tindak *fraud* (Karyono,2013:48).

Ada beberapa kasus tindak kecurangan yang terjadi di Indonesia, salah satunya kasus PT Angkasa Pura II yang baru terungkap 2014, yaitu pengadaan *Air Traffic Control* (ATC) Simulator Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tahun 2004 yang didatangkan dari Amerika Serikat diduga berbau korupsi dan alat tersebut hingga kini tidak dapat digunakan. Nilai kerugian negara mencapai Rp 7,4 miliar. Kejaksaan Agung pun telah menetapkan tersangka dalam kasus ini yaitu 4 orang tersangka dari pihak PT. Angkasa Pura II dan 1 orang tersangka dari

PT Toska Citra Pratama (TCP). Dari hasil penyidikan sementara, modus korupsi yang dilakukan kelima tersangka seputar penyalahgunaan mekanisme tender, dengan memenangkan PT TCP sebagai pemenang tender. Dugaan lainnya, meliputi spesifikasi barang yang tidak sesuai ketentuan. Pada prakualifikasi lelang, barang-barang tender sudah ditentukan spesifikasinya. Namun, saat pengadaan barang-barang tersebut tidak sesuai spesifikasi atau ketentuan yang telah disepakati. Akibatnya, ATC Simulator tersebut tidak dapat difungsikan secara maksimal. (<http://www.gresnews.com/berita/hukum/150152-korupsi-penyebab-sering-rusaknya-atc-bandara-soekarno-hatta/0/>, diakses 28 September 2016, 21:43 WIB).

Dari fenomena yang telah penulis narasikan diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kecurangan dalam penyalahgunaan *standard operational procedure* (SOP) dalam pelaksanaan tender pembelian ATC dimana tim memenangkan salah satu peserta tender dan menerima barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan. Hal ini berdampak pada kinerja bandara udara Soekarno Hatta. Sistem ATC yang dibeli mengalami kerusakan, akibatnya sistem pemanduan otomatis Jakarta *Automated Air Traffic System* (JAATS) tidak dapat bekerja selama 15 menit. Petugas pengatur lalu lintas udara itu terpaksa menggunakan sistem manual (non radar) untuk mengindar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 39 jadwal pemberangkatan dari Bandara Soekarno Hatta dan 22 penerbangan ke Bandara serta 3 penerbangan terpaksa dialihkan. Bahkan penerbangan dua pesawat milik maskapai penerbangan Lion Air hampir

bertabrakan. Terakhir pada 8 Februari 2014 sebanyak 30 pesawat terpaksa *delay* akibat sistem ATC radar bandara tersebut rusak.

Kecurangan pun terjadi di dunia perbankan, salah satu contoh kasus kecurangan pernah dialami oleh PT. Bank Negara Indonesia di Bandung. Tiga pejabat bank BNI didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan modus memperkaya sebuah korporasi dengan membuat perusahaan fiktif untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 12,5 miliar. Kasus ini berawal pada tahun 2010, BNI akan mengeluarkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp 25 miliar. Ketiga terdakwa membuat perusahaan fiktif dibantu oleh Didi Supriyadi yang kini menjadi terdakwa juga namun disidangkan terpisah. Mereka meminta Didi untuk membuat 50 kelompok kerja fiktif karena itu merupakan salah satu syarat layaknya kelompok kerja. Mulai dari lokasi kegiatan, jenis usaha, pengurus aktif dan memiliki produktif yang nyata. Didi selaku pimpinan PT. Simpang Jaya Dua mempersiapkan persyaratan tersebut beserta dokumen palsu dibantu oleh karyawannya. Setelah selesai, Didi merekrut 50 orang yang akan dijadikan ketua kelompok. Dengan begitu target KUR bisa tercapai yakni RP 25 miliar. Salah satu terdakwa yang menjabat sebagai wakil pimpinan Sentra Kredit Kecil yaitu Dodik Vevanto, meloloskan dokumen serta persyaratan yang diajukan tersebut seakan melakukan pembiaran. Padahal terdakwa Dodik mengetahui bahwa proses analisa kredit dilakukan tanpa melakukan pertemuan dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi, namun tetap menyetujui dengan memutus kredit 50 kelompok tersebut ([www.inilahkoran.com](http://www.inilahkoran.com), diakses pada tanggal 2 November 2016, 12:16 WIB)

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa kecurangan terjadi dimana terdakwa Dodik Vevanto telah melanggar prosedur analisa kredit. Proses analisa kredit dilakukan tanpa melakukan pertemuan dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi, namun tetap disetujui oleh terdakwa dengan memutus kredit bagi 50 kelompok tersebut.

Audit internal adalah salah satu perangkat yang diyakini dapat mendeteksi dan mencegah *fraud* dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena tanggung jawab auditor internal adalah untuk membantu manajemen mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan melaporkan *fraud* (Oktaviani, 2015). Jika pengendalian internal satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar (Agoes, 2012:103).

Kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh praktik *fraud* yang mendatangkan inefisiensi dan kerugian bagi perusahaan, oleh karena itu diperlukan efektivitas praktik pengendalian internal yaitu pembagian tugas (*segregation of duties*) yang jelas dan juga penerapan sanksi atau penalti terhadap pelaku *fraud* yang ternyata dapat meminimalisir terjadinya *fraud* (Barra, 2010). Tercapainya pengendalian internal perusahaan yang baik tentu saja akan meningkatkan produktivitas serta kinerja para karyawan (Usman, 2013). Menurut Suyadi dalam Mariyani (2015) arti kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka

upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Penulis dalam melakukan penelitian mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Isty (2014) dengan judul “Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)” hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh dalam pencegahan kecurangan. Penulis pun mengambil rujukan dari penelitian yang dilakukan oleh Andri (2014) yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung” hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan intern memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wyana Oktaviani dkk pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal Dalam Pencegahan *Fraud* (Kecurangan) Terhadap Kinerja Perusahaan” Penelitian tersebut terdiri atas tiga variabel penelitian, pertama yaitu pengendalian internal, kedua adalah pencegahan *fraud* (kecurangan), dan ketiga adalah kinerja perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan *purposive sampling* dengan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wyana Oktaviani (2014) yaitu pada variabel penelitian dimana penulis menggunakan pencegahan *fraud* sebagai variabel intervening. Disamping itu penelitian terdahulu menggunakan analisis linier berganda dengan teknik *purposive sampling* sedangkan penulis menggunakan *path analysis* dengan teknik

*stratified random sampling*. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2014) pada 4 BUMN sektor Industri dan Jasa Asuransi di Kota Bandung sedangkan untuk penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil Judul: **“Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Kantor Cabang Utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian internal pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.
2. Bagaimana pencegahan *fraud* pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.
3. Bagaimana kinerja perusahaan pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.



5. Seberapa besar pengaruh pencegahan *fraud* terhadap kinerja perusahaan pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh pencegahan *fraud* terhadap hubungan pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengendalian internal pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pencegahan *fraud* pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kinerja perusahaan pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pencegahan *fraud* terhadap kinerja perusahaan pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pencegahan *fraud* terhadap hubungan pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan pada kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi di bidang akuntansi khususnya auditing di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan judul tersebut.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **A. Bagi Penulis**

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman penulis mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan dalam pencegahan *fraud*. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan

#### **B. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada organisasi, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan menjadi masukan bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja PT Bank Negara Indonesia,

### C. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian pada masa mendatang.

### **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan kantor cabang utama PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung pada bulan September 2016 sampai dengan selesai.